

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia Nya sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025. Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Dokumen ini merupakan pedoman Perencanaan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat digunakan sebagai acuan perencanaan perangkat daerah oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dan bahan evaluasi demi peningkatan kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun mendatang khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Raopang dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya.

Pangkajene Sidenreng, 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



H. ABBAS ARAS, SP., M.AP
NIP. 196512311987111013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, rancangan awal rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan ranwal renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappelitbangda dan pemangku kepentingan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

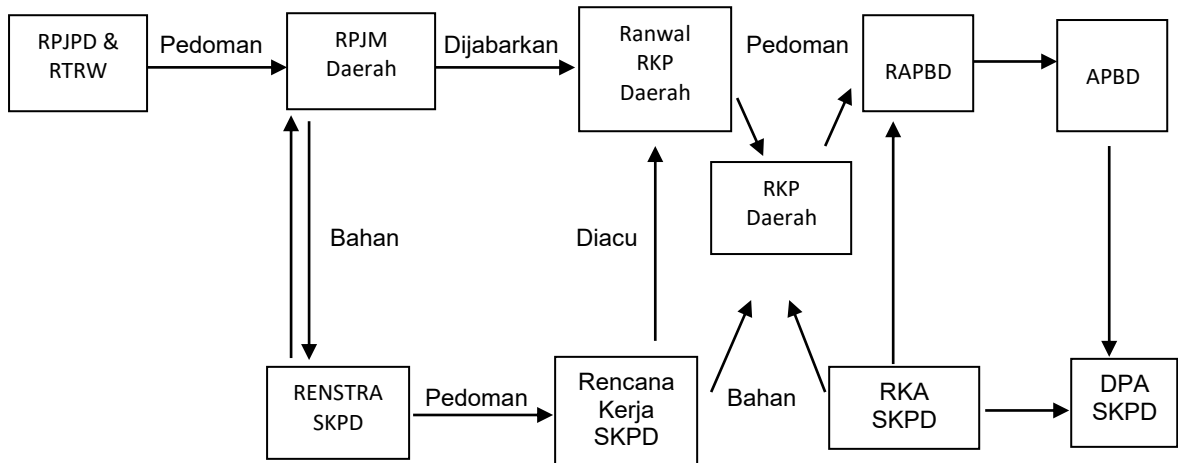
Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Rancangan Awal Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat.

KETERKAITAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Adalah dokumen awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah serta program yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD.

Oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan

Misi Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD 2025;
2. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Ranwal renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Ranwal Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
5. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan berkewajiban juga menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Dengan demikian diharapkan penyusunan Ranwal Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ini dapat menentukan rencana arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global.

Selanjutnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2025, dan akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, an Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pasal 147;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah sebagai dokumen awal Perencanaan Pembangunan yang dapat memberikan arahan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pelayanan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, di dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Disamping itu adanya penyesuaian program berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam Menyusun program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat meningkatkan capaian prosentase pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada tahun 2025. Sebagai bahan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.29
 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RESNTRA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG s.d TAHUN 2024
 PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8+(7/6)	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD	100		99.00	99.00	100%	100	100	100%
	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan Organisasi Pemerintah yang Ikut Dalam Kegiatan Pengarusutamaan Gender</i>	30.00	95.42	96.01	96.01	100%	30.00	30.00	100%
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sscial dan Ekonomi Kewenangan	3	4	4	4	100%	2	2	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8+(7/6)	9	10	11
		Kabupaten/Kota								
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak</i>	100	100	-	-	-	100	100	100%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29	-	-	-	-	29	29	100%
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Indek Perlindungan Anak (IPA)	100	-	0.001	0.001	100%	100	100	100%
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan untuk Pemenuhan Hak Anak	100	-	100	100	100%	100	100	100%
	Advokasi Kebijakan dan	Jumlah Organisasi Pemerintah,	5	2	4	4	100%	3	3	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8+(7/6)	9	10	11
	Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Haka Anak pada Organisasi Pemerintah, Media dan Dunia Usaha								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	24	12	12	100%	3	3	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2	1	1	100%	1	1	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1	2	1	1	100%	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8+(7/6)	9	10	11
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2	1	1	100%	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2	1	1	100%	1	1	100%
	KOordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	4	2	2	100%	2	2	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	35	35	35	100%	35	35	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/ SKPD	60	2	1	1	100%	60	60	100%
	Administrasi Umum Perangkat	Persentase Administrasi Umum	100	100	100	100	100%	100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8+(7/6)	9	10	11
	Daerah	Perangkat Daerah								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	-	-	-	-	1	1	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	162	166	166	100%	145	145	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	16	16	5	31.25%	16	10	62.50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8+(7/6)	9	10	11
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	5	-	-	-	-	3	3	100%
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kawasan Perdesaan yang Difasilitasi	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Cakupan Kawasan Perdesaan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5	10	1	1	100%	2	2	100%
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Mampu Menyelenggarakan tertib Administrasi Desa dan Pelaporan Tepat Waktu	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Pembinaan dan Pengawasabn Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	68	68	68	68	100%	68	68	100%
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	68	32	19	19	100%	68	68	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8+(7/6)	9	10	11
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	68	68	68	68	100%	68	68	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	68	68	68	68	100%	68	68	100%
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5	-	68	-	-	5	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mampu Meningkatkan Kapasitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendagunaan Kelembagaan Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	16	39	5	5	100%	17	17	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8+(7/6)	9	10	11
	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	26	21	8	38.09	12	12	100%
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Perasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM	19	27	27	27	100%	20	20	100%
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemnfaatan Teknologi Tepat Guna	20	20	1	1	100%	20	20	100%
	Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	13	-	8	8	100%	13	13	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8+(7/6)	9	10	11
	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa								
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	106	106	106	106	100%	106	106	100%

Dari tabel TC.29 diatas terlihat bahwa Sebagian besar indikator telah sesuai target. Namun ada beberapa indikator baru yang digunakan dalam renstras 2024-2026 sehingga belum dilaksanakan pengukurannya pada tahun 2022 dan 2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditentukan melalui Perjanjia Kinerja yang telah dibuat Bersama. Jenis indikator yang dikaitkan dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pencapaian kinerja harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, dan akuntabilitas. Dengan harapan dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal tersenbut dapat dilihat dalam tabel T-C.30

Tabel T-C.30
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
 DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN SINDENRENG RAPPANG

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
1	Persentase ARG pada Belanja Modal APBD				100	100	100		100	0	0	
2	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO				100	100	100					
3	Cakupan Organisasi Pemerintah yang ikut dalam Kegiatan Pengarusutamaan gender			96.01	29.00	29.00	29.00	96.01	0	0	0	
4	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota					1	1	0	0	0	0	
5	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1	1	1					
6	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			29	29	29	29	0	0	0	0	
7	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			29	29	29	29	29	29	0	0	
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			55.01	30.00	30.00	30.00	55.01	30.00	0	0	
9	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,			4	2	3	3	4	2	0	0	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota											
10	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					4	5	0	0	0	0	
11	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO					100	100					
12	Cakupan Kekerasan terhadap Perempuan					100	100					
13	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					1	1					
14	Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga				100	100	100		100	0	0	
15	Persentase Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak				100	100	100		100	0	0	
16	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					29	29		29	0	0	
17	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					1	1					
18	Cakupan Data Gender dan Anak				100	100	100		0	0	0	
19	Persentase Data yang dikumpulkan, Diolah, Dianalisis Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data				100	100	100					
20	Jumlah Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				2	2	2					

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	yang Tersedia											
21	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Kewenagann Kabupaten/Kota					2	2					
22	Indeks Pemenuhan Hak Anak (PHA)			100	100	100	100	100	100	0	0	
23	Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan untuk Pemenuhan Hak Anak				100	100	100		100	0	0	
24	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			4	3	4	5	4	3	0	0	
25	Cakupan Latihan Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Anak				75	85	100					
26	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitasb Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					85	100					
27	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1	1	1					
28	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1	1					
29	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota			2	1	1	1	2				
30	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten				100	100	100	0	0	0	0	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Cakupan Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					100	100					
32	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					29	29					
33	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1	1					
34	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				100	100	100					
35	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1	1	1					
BIDANG PEMBANGUNAN DAN UED												
36	Persentase Peningkatan Kawasan Perdesaan yang di fasilitasi			100	100	100	100	100	100	0	0	
37	Cakupan Kawasan Perdesaan			100	100	100	100	100	100	0	0	
38	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			1	2	3	5	1	2	0	0	
39	Persentase Desa yang Mampu Menyelenggarakan Tertib Administrasi Desa dan Pelaporan Tepat Waktu			100	100	100	100	100	100	0	0	
40	Cakupan Pelaksanaan Tatakelola Administrasi Pemerintahan Desa			100	100	100	100	100	100	0	0	
41	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama anatar Desa			19	68	68	68	19	68	0	0	
42	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang			100	100	100	100	100	100	0	0	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Mampu Meningkatkan Kapasitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat											
43	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang dibina			100	100	100	100	100	100			
44	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			27	20	10	19	27	20	0	0	
45	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemnafaatan Teknologi Tepat Guna			8	13	13	13	8	20	0	0	
BIDANG BINA PEMERINTAH DESA												
46	Persentase Desa yang Mampu Menyelenggarakan Tertib Administrasi Desa dan Pelaporan Tepat Waktu			100	100	100	100	100	100	0	0	
47	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum					2	2					
48	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa					68	68					
49	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa			68	68	68	68	68	68	0	0	
50	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			1	0	38	0	1	0	0	0	
51	Jumlahn Dokumen Profil Desa			68	23	23	22	68	23	0	0	
52	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			68	23	23	22	68	23	0	0	
53	Jumlah Desa yang difasilitasi Dalam Penetapan Penegasan Batas Desa			68	5	5	5	0	0	0	0	
54	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa					38	0	0	0	0	0	
BIDANG KELEMBANGAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT												
55	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mampu Meningkatkan Kapasitas Dalam			100	100	100	100	100	100	0	0	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemberdayaan Masyarakat											
56	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang dibina			100	100	100	100	100	100	0	0	
57	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			5	17	17	16	5	17	0	0	
58	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya			21	12	10	10	8	12	0	0	
59	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			8	13	13	13	8	13	0	0	
60	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1	106	106	106	1	106	0	0	
SEKRETARIAT												
61	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100	100	100	0	0	
62	Persentase Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	0	0	
63	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	3	3	3	2	3	0	0	
64	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	1	1	1	1	1	0	0	
65	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan			1	1	1	1	1	1	0	0	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
66	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1	1	1	1	1	1	0	0	
67	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1	1	1	1	1	1	0	0	
68	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2	2	2	2	2	2	0	0	
69	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	0	0	
70	Jumlah Orang yang Menrima Gaji dan Tunjangan ASN			31	35	40	40	31	35	0	0	
71	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			1	60	60	60	1	60	0	0	
72	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah					100	100	0	0	0	0	
73	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1	1	0	0	0	0	
74	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	0	0	
75	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			0	15	20	20	0	0	0	0	
76	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				1	2	2	0	1	0	0	
77	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			166	145	150	150	166	145	0	0	
78	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang				100	100	100					

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
79	Jumlah Paket Mebel yang disediakan					2	2	0	0	0	0	
80	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan				3	5	5	0	0	0	0	
81	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			0	5	5	5	0	0	0	0	
82	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			100	100	100	100	100	100	0	0	
83	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			16	16	16	16	5	10	0	0	
84	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3	5	5		3	0	0	
85	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1	1	1	0	0	0	0	
86	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			9	3	5	5	6	0	0	0	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan indikator kinerja periode 2024-2026 sebagai tolak ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis dikarenakan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan akan gambaran tentang, peran dan fungsi yang diembannya. Jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Adalah sebagai berikut :

- 1, Pelayanan Administratif dan Pengaturan Pemerintahan Desa
 - a. Pembinaan dan pengaturan kelembagaan pemerintahan desa
 - b. Pembinaan administrasi aaset dan keuangan dedsa
 - c. Fasilitasi Kerjasama antatr desa atau kolaborasi antar desa dalam program pembangunan perdesaaan
2. Pelayanan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
3. Pelatihan pengembangan usaha ekonomi desa serta pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan (ekonomi local) agar desa menjadi lebih mandiri dan produktif
4. Pelatihan dan peningkatan kapasitas Perempuan
5. Layanan pengaduan dan pendampinga untuk perempuan korban kekerasan

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang mampu membuat PPRG secara optimal	Masih ada OPD yang bekum mampu membuat PPRG (Program Penganggaran Responsif Gender)	Petugas yang sudah dilatih dimutasi ke tempat lain
2	Indeks Pemberdayaan Gender memiliki capaian yang optimal	Jumlah Perempuan yang ada di pengambilan Keputusan dan yang terpilih duduk di kursi parlemen masih rendah	Jumlah Perempuan yang terpilih sebagai pengambil Keputusan masih rendah
3	Penanganan Kekerasan Perempuan yang optimal	Masih rendahnya jumlah laporan kekerasan pada perempuan	Sosialisasi maksimal tentang penanganan kekerasan pada Perempuan
4	Sosialisasi maksimal tentang penanganan kekerasan pada	Belum terlaksananya pelaporan gender dan anak yang rutin dari semua OPD terkait	Profil gender belum optimal karena data yang masuk belum maksimal
5	Belum ditindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang LKD/K dan LAD/K	Desa/Kelurahan perlu peningkatan pemberdayaan LKD/K dan LAD/K	Belum adanya keseriusan pemerintah desa/kelurahan dalam peningkatan kapasitas LKD/K dan LAD/K

6	Belum maksimalnya fasilitasi kerjasama antar desa, pembangunan kawasan dan administrasi pemerintahan desa	Perlunya pembinaan fasilitasi Kerjasama antar desa	Keterbatasan jumlah SDM dan anggaran dalam fasilitasi
7	Pembinaan administrasi desa belum berjalan maksimal.	Terlambatnya ditetapkan apbdesa di desa	Rendahnya pengetahuan tentang administrasi di desa
		Terlambatnya ditetapkan Rkpdesa di desa	Ketidaksesuaian tugas pokok dan fungsi bidang terhadap pejabat fungsional yang ditempatkan dibidang bina pemerintahan desa
		Terlambatnya disusun produk hukum desa	Tidak adanya jabatan fungsional analis kebijakan, perancang peraturan perundang undangan, perencana dan analis keuangan pusat dan daerah ditempatkan di bidang bina pemerintahan desa.
		Terlambatnya penyusunan laporan inventaris aset desa	
		terlambatnya penyusunan data profil desa	

2.3.3 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Sinergitas sektoral pembangunan desa;
2. Rendahnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik;
3. Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) dalam mendukung pembangunan di desa;
4. Akses Perempuan terhadap layanan ekonomi produktif masih terbatas
5. Minimnya data terpilah gender
6. Kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi
7. Fasilitas ramah anak terbatas
8. Sistem layanan perlindungan anak belum terpadu

B. Peluang

Peluang-peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada lima tahun mendatang adalah :

1. Ketersediaan regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan Masyarakat dan desa;
2. Dukungan kebijakan nasional/daerah mengenai desa, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
3. Transformasi digital desa;
4. Potensi ekonomi dan sosial desa berkembang pesat;

5. Peluang dana dari Dana Desa, CSR, dan program Kementerian

2.3.4 Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Kapasitas tata Kelola pemerintah desa yang belum maksimal
2. Kinerja BUMDesa dan pemberdayaan ekonomi desa yang belum optimal
3. Partisipasi Perempuan dalam pembangunan desa rendah
4. Angka kekerasan terhadap Perempuan dan anak masih perlu perhatian khusus
5. Sistem perlindungan anak terpadu belum berjalan maksimal
6. Ketahanan keluarga masih rendah terutama terkait pola pengasuhan dan literasi digital
7. Keterbatasan anggaran dan SDM pendukung
8. Kolaborasi multipihak dan lintas sektor belum optimal
9. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola desa, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak belum optimal

2.4 Reviu Terhadap Rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan kerja Perangkat Daerah tahun 2025. Reviu terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur dan target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan pada Perangkat Daerah. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.31
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Sidrap	Persentase ARG pada Belanja Belanja Operasional dan Belanja Moidal APBD	100	370.700.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Sidrap	Persentase ARG pada Belanja Belanja Operasional dan Belanja Moidal APBD	100	370.700.000	
	<i>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Cakupan Organisasi Pemerintah yang Ikut dalam Kegiatan Pengarusutamaan Gender</i>	<i>29.00</i>	<i>120.700.000</i>	<i>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Cakupan Organisasi Pemerintah yang Ikut dalam Kegiatan Pengarusutamaan Gender</i>	<i>29.00</i>	<i>120.700.000</i>	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	50.000.000	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenngan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	1	25.250.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenngan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	1	25.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota					Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Sidrap	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	29	20.200.000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Sidrap	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	29	20.200.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Sidrap	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	30.00	250.000.00	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Sidrap	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	30.00	250.000.00	
4	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi	3	200.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi	3	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			
5	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Sidrap	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4	50.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Sidrap	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4	50.000.000	
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Sidrap	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	100	50.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Sidrap	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	100	50.000.000	
	<i>Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Cakupan Kekerasan terhadap Perempuan</i>	<i>100</i>	<i>50.000.000</i>	<i>Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Cakupan Kekerasan terhadap Perempuan</i>	<i>100</i>	<i>50.000.000</i>	
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	1	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	1	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Sidrap	Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	100	85.350.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Sidrap	Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	100	85.350.000	
	<i>Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Persentase Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak</i>	<i>100</i>	<i>85.350.000</i>	<i>Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Persentase Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak</i>	<i>100</i>	<i>85.350.000</i>	
7	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	29	35.350.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	29	35.350.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
8	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1	50.000.000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1	50.000.000	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Sidrap	Cakupan Data Gender dan Anak	100	100.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Sidrap	Cakupan Data Gender dan Anak	100	100.500.000	
	<i>Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Persentase Data yang dikumpulkan, Diolah, Dianalisis Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data</i>	<i>100</i>	<i>100.000.000</i>	<i>Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Persentase Data yang dikumpulkan, Diolah, Dianalisis Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data</i>	<i>100</i>	<i>100.000.000</i>	
9	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	50.500.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	50.500.000	
10	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data	2	50.000.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data	2	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			
V	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Sidrap	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	100	241.000.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Sidrap	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	100	241.000.000	
	<i>Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Cakupan lembaga yang memberikan layanan untuk pemenuhan hak anak</i>	<i>100</i>	<i>50.500.000</i>	<i>Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Cakupan lembaga yang memberikan layanan untuk pemenuhan hak anak</i>	<i>100</i>	<i>50.500.000</i>	
11	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4	50.500.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4	50.500.000	
	<i>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Cakupan Latihan untuk peningkatan kualitas hidup anak</i>	<i>85</i>	<i>190.500.000</i>	<i>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Cakupan Latihan untuk peningkatan kualitas hidup anak</i>	<i>85</i>	<i>190.500.000</i>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
12	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	85	50.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	85	50.000.000	
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	50.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	50.500.000	
14	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	50.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	50.000.000	
15	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar	1	40.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar	1	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Sidrap	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	100.250.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Sidrap	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	100.250.000	
	<i>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Cakupan Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>100</i>	<i>75.000.000</i>	<i>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Cakupan Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>100</i>	<i>75.000.000</i>	
16	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. sidrap	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	29	35.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. sidrap	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	29	35.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	40.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100	25.250.000	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100	25.250.000	
18	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	25.250.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	25.250.000	
VII	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Kab. Sidrap	Persentase peningkatan kawasan perdesaan yang difasilitasi	100	15.150.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Kab. Sidrap	Persentase peningkatan kawasan perdesaan yang difasilitasi	100	15.150.000	
	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Kab. Sidrap	Cakupan kawasan perdesaan	100	15.150.000	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Kab. Sidrap	Cakupan kawasan perdesaan	100	15.150.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3	15.150.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3	15.150.000	
VIII	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Sidrap	Persentase desa yang mampu Menyelenggarakan tertib administrasi desa dan pelaporan tepat waktu	100	675.950.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Sidrap	Persentase desa yang mampu Menyelenggarakan tertib administrasi desa dan pelaporan tepat waktu	100	675.950.000	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sidrap	Cakupan pelaksanaan tatakelola administrasi pemerintahan desa	100	675.950.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sidrap	Cakupan pelaksanaan tatakelola administrasi pemerintahan desa	100	675.950.000	
20	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	2	50.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	2	50.000.000	
21	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	68	40.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	68	40.000.000	
22	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	68	30.300.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	68	30.300.000	
23	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	68	25.250.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	68	25.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sama antar Des					Sama antar Des			
24	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	38	455.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	38	455.000.000	
25	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Profil Desa	23	10.100.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Profil Desa	23	10.100.000	
26	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	23	10.100.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	23	10.100.000	
27	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5	20.200.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5	20.200.000	
28	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Des	38	35.000.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Des	38	35.000.000	
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Sidrap	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat	100	262.600.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Sidrap	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat	100	262.600.000	
	<i>Kegiatan Pemberdayaan</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Persentase Lembaga</i>	<i>100</i>	<i>262.600.000</i>	<i>Kegiatan Pemberdayaan</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Persentase Lembaga</i>	<i>100</i>	<i>262.600.000</i>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina			Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina			
29	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	17	75.750.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	17	75.750.000	
30	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga	Kab. Sidarp	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	10	50.500.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga	Kab. Sidarp	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	10	50.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
31	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sidrap	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10	15.150.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sidrap	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10	15.150.000	
32	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10	15.150.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10	15.150.000	
33	Fasilitasi	Kab.	Jumlah Dokumen	13	25.250.000	Fasilitasi	Kab.	Jumlah Dokumen	13	25.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Sidrap	Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Sidrap	Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			
34	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	106	80.800.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	106	80.800.000	
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Sidrap	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.167.782.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Sidrap	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.167.782.000	
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>100</i>	<i>17.170.000</i>	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Sidrap</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>100</i>	<i>17.170.000</i>	
35	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3.535.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3.535.000	
36	Koordinasi dan	Kab.	Jumlah Dokumen	1	2.525.000	Koordinasi dan	Kab.	Jumlah Dokumen	1	2.525.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Sidrap	RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Sidrap	RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
37	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2.525.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2.525.000	
38	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2.525.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2.525.000	
39	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2.525.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2.525.000	
40	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	2	3.535.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	2	3.535.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.544.382.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.544.382.000	
41	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	2.531.252.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	2.531.252.000	
42	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	60	13.130.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	60	13.130.000	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	Persentase pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	22.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	Persentase pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	22.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	22.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	22.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	230.874.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	230.874.000	
44	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidrap	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	5.050.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidrap	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	5.050.000	
45	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidrap	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	25.250.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidrap	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	25.250.000	
46	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	175.324.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	175.324.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidrap	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidrap	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		
47	Pengadaan Mebel	Kab.	Jumlah Paket Mebel	2	5.050.000	Pengadaan Mebel	Kab.	Jumlah Paket Mebel	2	5.050.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Sidrap	yang Disediakan				Sidrap	yang Disediakan			
48	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidrap	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	2.525.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidrap	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	2.525.000	
49	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidrap	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	5.050.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidrap	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	5.050.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidrap	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	213.615.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidrap	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	213.615.000	
50	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	151	1.515.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	151	1.515.000	
51	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	42.420.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	42.420.000	
52	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	169.680.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	169.680.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Sidrap	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik	100	139.741.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Sidrap	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik	100	139.741.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan Daerah		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			Pemerintahan Daerah		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			
53	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidrap	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	79.679.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidrap	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	79.679.000	
54	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidrap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	3.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidrap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	3.300.000	
55	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sidrap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	50.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sidrap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	50.500.000	
56	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidrap	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	6.262.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidrap	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	6.262.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Indonesia Adalah negara kepulauan yang disatukan bukan sebaliknya dipisahkan oleh lautan. Visi Indonesia Emas 2045 tidak lepas dari adicita pendirinya yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Beerkelanjutan. Segala upaya pembangunan harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut, dituangkan dalam RPJN 2025-2045. Indonesia akan menjadi negara Tangguh mandiri, dan inklusif di 2045. Pembangunan 20 tahun ke depan diharapkan dapat mendorong Indonesia bertransformasi menuju peradaban Masyarakat yang modern dan sejahtera.

Tema pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 adalah “Penguatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Transformasi Sosial dan Ekonomi”, dengan sasaran diantaranya Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran mbangunan tahun 2024, maka prioritas pembangunan pada RKP 2024 adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; penguatan sistem agrobisnis am mendukung pengembangan perekonomian daerah; peningkatan rastruktur dasar dan ekonomi; peningkatan akses layanan pendidikan dan ehatan; perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; penataan ingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana; peningkatan aktivitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya, dan aman.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, maka penyusunan Rencana Kerja Awal Tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat, serta mengoptimalkan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Rumusan tujuan dan sasaran ini disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang, kebutuhan desa, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Memperkuat pemberdayaan masyarakat desa serta mendorong kemandirian ekonomi dan kelembagaan desa.

3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan akses, partisipasi, dan pemberdayaan dalam berbagai aspek pembangunan.
4. Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak melalui layanan yang terintegrasi dan berbasis komunitas.
5. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pembangunan desa, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
6. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan internal dinas untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas aparatur desa dalam administrasi, keuangan, dan pelayanan publik.
2. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan.
3. Meningkatnya kinerja dan produktivitas BUMDes/BUMDesma.
4. Terasilinasinya kelompok masyarakat desa (PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan lainnya) dalam kegiatan pemberdayaan.
5. Menguatnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat kabupaten dan desa.
6. Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7. Meningkatnya efektivitas koordinasi lintas sektor dalam isu pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN 2025
Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7875
	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,8739
		indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,7641
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,7246
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	50
Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,01

Layak Anak			
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Madya
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan	100
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai suatu organisasi yang bernaung di bawah pemerintah, maka sebagai konsekuensi logis dalam Menyusun Rencana Kerja harus berpedoman pada peraturan tersebut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Siderneng Rappang tahun 2025 merencanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termasuk dalam Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

TABEL	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Operasional dan Belanja Modal APBD	Kab. Sidenreng Rappang	100	370.700.000	PAD		100	374.402.000
2	08	02	2	01		<i>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan Organisasi Pemerintah yang Ikut Dalam Kegiatan Pengarusutamaan Gender</i>	<i>Kab. Sidenreng Rappang</i>	<i>29.00</i>	<i>120.700.000</i>	<i>PAD</i>		<i>29.00</i>	<i>121.902.000</i>
2	08	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1	50.000.000	PAD		1	50.500.000
2	08	02	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1	25.250.000	PAD		1	25.500.000

TABEL						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	02	2	01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	29	25.250.000	PAD		29	25.500.000
2	08	02	2	01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan	Kab. Sidenreng Rappang	29	20.200.000	PAD		29	20.402.000
2	08	02	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Kab. Sidenreng Rappang	30.00	250.000.000	PAD		30.00	252.500.000
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	3	200.000.000			3	202.000.000
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab. Sidenreng Rappang	4	50.000.000			5	50.500.000

TABEL	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota							
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Kab. Siderneng Rappang	100	50.000.000	PAD		100	50.500.000
	<i>Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan Kekerasan terhadap Perempuan</i>	<i>Kab. Siderneng Rappang</i>	<i>100</i>	<i>50.000.000</i>	<i>PAD</i>		<i>100</i>	<i>50.500.000</i>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1	50.000.000	PAD		1	50.500.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	Kab. Sidenreng Rappang	100	85.350.000	PAD		100	86.200.000
	<i>Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak</i>	<i>Persentase Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak</i>	<i>Kab. Siderneng Rappang</i>	<i>100</i>	<i>85.350.000</i>	<i>PAD</i>		<i>100</i>	<i>86.200.000</i>

TABEL	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	Kab. Siderneng Rappang	29	35.350.000	PAD		29	35.700.000
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1	50.000.000	PAD		1	50.500.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Gender dan Anak	Kab. Sidenreng Rappang	100	100.500.000	PAD		100	101.505.000
	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data yang dikumpulkan, Diolah, Dianalisis Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Kab. Siderneng Rappang	100	100.500.000	PAD		100	101.505.000
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang	Kab. Siderneng Rappang	2	50.500.000	PAD		2	51.005.000

TABEL	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedia							
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	2	50.000.000	PAD		2	50.500.000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Kab. Sidenreng Rappang	100	241.000.000	PAD		100	243.455.000
	<i>Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan lembaga yang memberikan layanan untuk pemenuhan hak anak</i>	<i>Kab. Sidenreng Rappang</i>	<i>100</i>	<i>50.500.000</i>	<i>PAD</i>		<i>100</i>	<i>51.005.000</i>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Sidenreng Rappang	4	50.500.000	PAD		5	51.005.000
	<i>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan</i>	<i>Cakupan Latihan untuk peningkatan kualitas hidup</i>	<i>Kab. Sidenreng</i>	<i>85</i>	<i>190.500.000</i>	<i>PAD</i>		<i>100</i>	<i>192.450.000</i>

TABEL	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	anak	Rappang						
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	85	50.000.000	PAD		100	50.500.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1	50.500.000	PAD		1	51.050.000
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1	50.000.000	PAD		1	50.500.000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Kab. Sidenreng Rappang	1	40.000.000	PAD		1	40.400.000

TABEL	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota							
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Kab. Sidenreng Rappang	100	100.250.000	PAD		100	101.250.000
	<i>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Sidenreng Rappang</i>	<i>100</i>	<i>75.000.000</i>	<i>PAD</i>		<i>100</i>	<i>75.750.000</i>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Sidenreng Rappang	29	35.000.000	PAD		29	35.350.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1	40.000.000	PAD		1	40.400.000
	<i>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan</i>	<i>Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</i>	<i>Kab. Sidenreng Rappang</i>	<i>100</i>	<i>25.250.000</i>	<i>PAD</i>		<i>100</i>	<i>25.500.000</i>

TABEL	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1	25.250.000	PAD		1	25.500.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase peningkatan kawasan perdesaan yang difasilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	100	15.150.000	PAD		100	15.301.000
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Cakupan kawasan perdesaan	Kab. Sidenreng Rappang	100	15.150.000	PAD		100	15.301.000
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Sidenreng Rappang	3	15.150.000	PAD		5	15.301.000
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mampu Menyelenggarakan tertib administrasi desa dan pelaporan tepat waktu	Kab. Sidenreng Rappang	100	675.950.000	PAD		100	187.809.000
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan tatakelola administrasi pemerintahan desa	Kab. Sidenreng Rappang	100	675.950.000	PAD		100	187.809.000
	Fasilitasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil	Kab.	2	50.000.000	PAD		2	50.500.000

TABEL	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Produk Hukum Desa	Penyusunan Produk Hukum Desa	Sidenreng Rappang						
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Sidenreng Rappang	68	40.000.000	PAD		68	40.400.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Sidenreng Rappang	68	30.300.000	PAD		68	30.603.000
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Des	Kab. Sidenreng Rappang	68	25.250.000	PAD		68	25.502.000
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Sidenreng Rappang	38	455.000.000	PAD		0	0
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kab. Sidenreng Rappang	23	10.100.000	PAD		22	10.201.000
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kab. Sidenreng Rappang	23	10.100.000	PAD		22	10.201.000
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kab. Sidenreng Rappang	5	20.200.000	PAD		5	20.402.000
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala	Kab. Sidenreng	38	35.000.000	PAD		0	0

TABEL	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Des	Rappang						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	100	262.600.000	PAD		100	265.224.000
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina</i>	<i>Kab. Sidenreng Rappang</i>	<i>100</i>	<i>262.600.000</i>	<i>PAD</i>		<i>100</i>	<i>265.224.000</i>
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Kab. Sidenreng Rappang	17	75.750.000	PAD		16	76.507.000

TABEL	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	10	50.500.000	PAD		10	51.005.000
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sidenreng Rappang	10	15.150.000	PAD		19	15.301.000
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Sidenreng Rappang	10	15.150.000	PAD		20	15.301.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan	Kab. Sidenreng Rappang	13	25.250.000	PAD		13	25.502.000

TABEL	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Perlindungan Masyarakat Desa	Perlindungan Masyarakat Desa							
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sidenreng Rappang	106	80.800.000	PAD		106	81.608.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	3.167.782.000	PAD		100	3.199.453.000
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Sidenreng Rappang</i>	<i>100</i>	<i>17.170.000</i>	<i>PAD</i>		<i>100</i>	<i>17.340.000</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	3	3.535.000	PAD		3	3.570.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1	2.525.000	PAD		1	2.550.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Kab. Sidenreng Rappang	1	2.525.000	PAD		1	2.550.000

TABEL	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		SKPD							
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1	2.525.000	PAD		1	2.550.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1	2.525.000	PAD		1	2.550.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Kab. Sidenreng Rappang	2	3.535.000	PAD		2	3.570.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	2.544.382.000	PAD		100	2.569.826.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	40	2.531.252.000	PAD		40	2.556.565.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/	Kab. Sidenreng Rappang	60	13.130.000	PAD		60	13.261.000

TABEL	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Semesteran SKPD							
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	22.000.000	PAD		100	22.220.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1	22.000.000	PAD		1	22.220.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	230.874.000	PAD		100	207.679.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	20	5.050.000	PAD		20	5.100.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	2	25.250.000	PAD		2	25.502.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	150	175.324.000	PAD		150	177.077.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	12.625.000	PAD		100	25.503.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	2	5.050.000	PAD		2	7.853.000
	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan	Kab.	5	2.525.000	PAD		5	7.550.000

TABEL	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Disediakan	Sidenreng Rappang						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	5	5.050.000	PAD		5	10.100.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	213.615.000	PAD		100	215.751.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	151	1.515.000	PAD		153	1.530.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12	42.420.000	PAD		12	42.844.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12	169.680.000	PAD		12	171.377.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Sidenreng Rappang	100	139.741.000	PAD		100	141.134.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Kab. Sidenreng Rappang	16	79.679.000	PAD		16	80.476.000

TABEL	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lapangan	Perizinannya							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	5	3.300.000	PAD		5	3.333.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	1	50.500.000	PAD		1	51.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	5	6.262.000	PAD		5	6.325.000

BAB IV

PENUTUP

Rancangan awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, sehingga terdapat keselarasan anatar dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi Masyarakat maupun kebutuhan.

Dokumen Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mewujudkan good governance di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



H. ABBAS ARAS, SP., M.AP
NIP-196512311987111013